

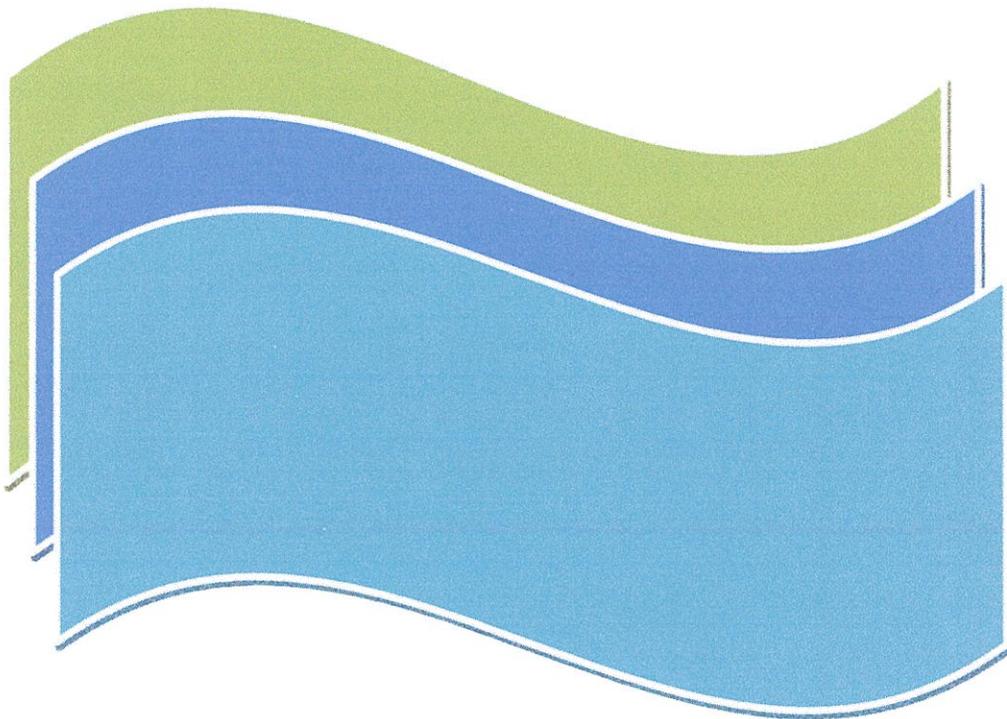


PEMERINTAH KOTA DUMAI
Jl. Tuanku Tambusai Telp. (0765) 440226

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI



TAHUN ANGGARAN
2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	5
1.6 Peta Proses Bisnis	7
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI	
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	23
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	31
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra	35
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target/SPM)	37
3.5 Akuntabilitas Keuangan	38
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	40
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta Lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	xiii
Tabel 2	Program Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	xiv
Tabel 3	Perubahan Program Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	xiv
Tabel 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	xv
Tabel 5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023.....	xvii
Tabel 6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023.....	xix
Tabel 7	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	9
Tabel 8	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	9
Tabel 9	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	14
Tabel 10	Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023	16
Tabel 11	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023.....	17
Tabel 12	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2023.....	18
Tabel 13	Program Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai	19
Tabel 14	Program Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	20
Tabel 15	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel 16	Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	23
Tabel 17	Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	25
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	32
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	35
Tabel 20	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	37
Tabel 21	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	39
Tabel 20	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai	4
Gambar 2	Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	6
Gambar 3	Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	8
Gambar 4	Misi ke - 4 Kota Dumai	12

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Urusan Pemerintahan Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 15 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710605 199903 1013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Urusan Pendukung yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang secara teknis bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke-4 pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik “ dan SASARAN yang ke 2 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.** “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (dua) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 64 (enam puluh empat) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Atau Dinas Jabatan

- Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari:
 - Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Subkegiatan Pembahasan APBD
 - Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 - Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester
 - Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

- Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Subkegiatan Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
- Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
8. Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

- Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami Dua kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : 1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	ADA
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	ADA
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	ADA

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 54.094.973.578,- (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2

Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 44.553.362.535	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 9.541.611.043	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 54.094.973.578	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 46.916.494.813	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.648.478.765	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 60.564.973.578	

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%	√			
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	ADA	ADA	100%	√			
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam	ADA	ADA	100%	√			
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	ADA	ADA	100%	√			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori sangat berhasil dengan tingkat capaian kinerja 100%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 60.564.973.578 (*Enam Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah .*) bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 58.696.373.428 (*Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.878.600.150 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*)

1. Belanja Operasi	:	Rp.	58.686.373.426
2. Belanja Modal	:	Rp.	1.878.600.150
J u m l a h	:	Rp.	60.564.973.578

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
Sasaran : Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada	100%			
	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk	Ada	Ada	100%			

	melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan							
	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	100%				
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	40.598.427.813	86,53%	86,53%	
Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	13.189.499.495	96,85%	96,85%	

Sebagaimana data tersebut di atas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					
		Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT					
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan					
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD					

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja Utama* Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
4. Pada *Indikator Kinerja Utama* Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Serketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

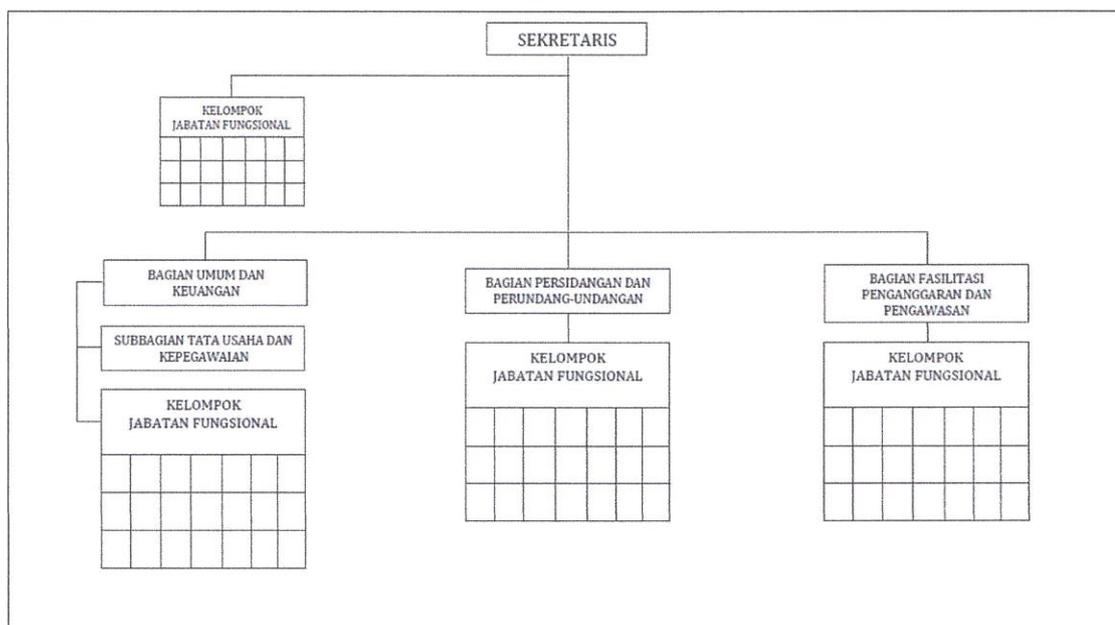
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pendukung yang perlu ditangani sbb:

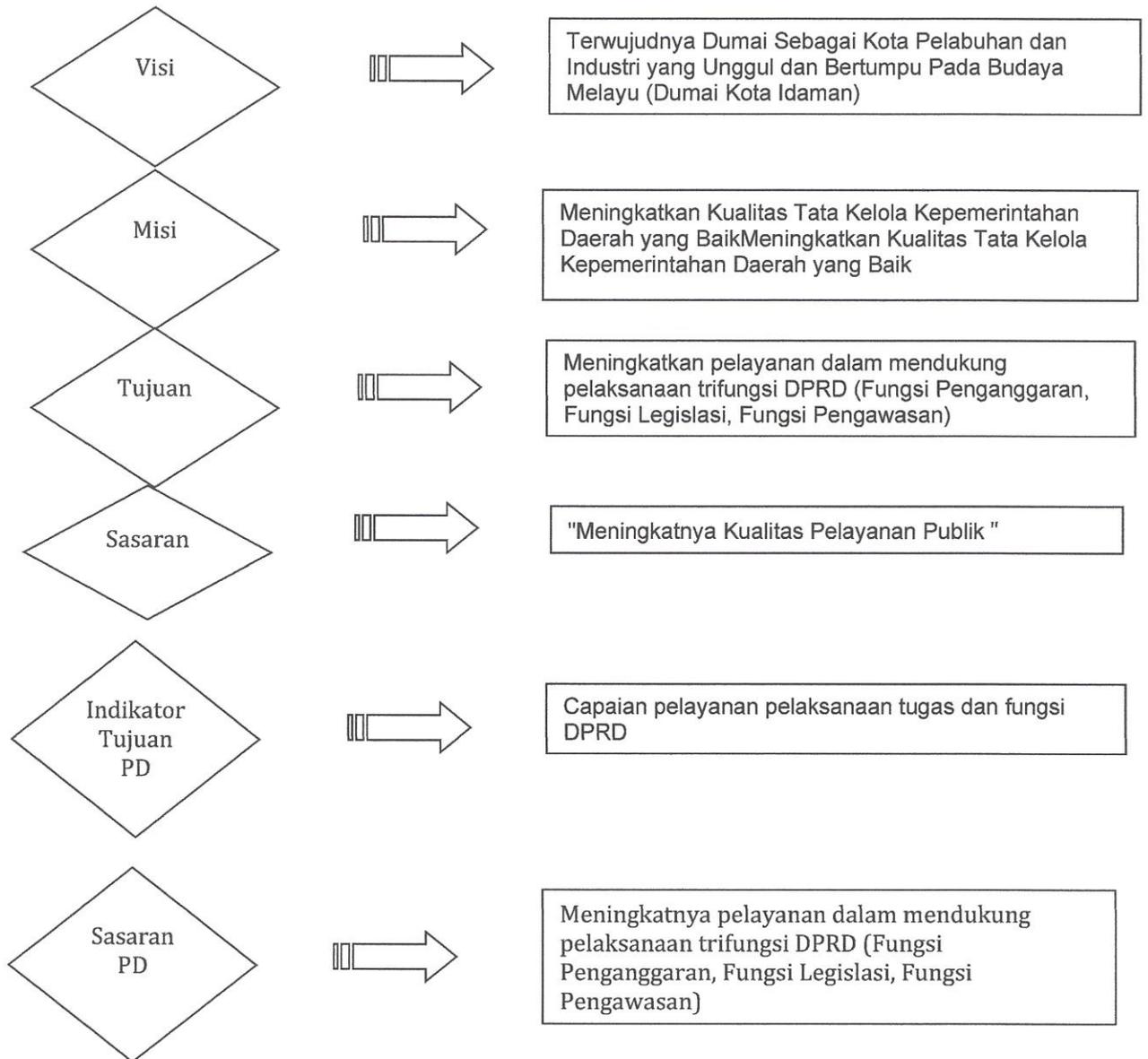
1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalikan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

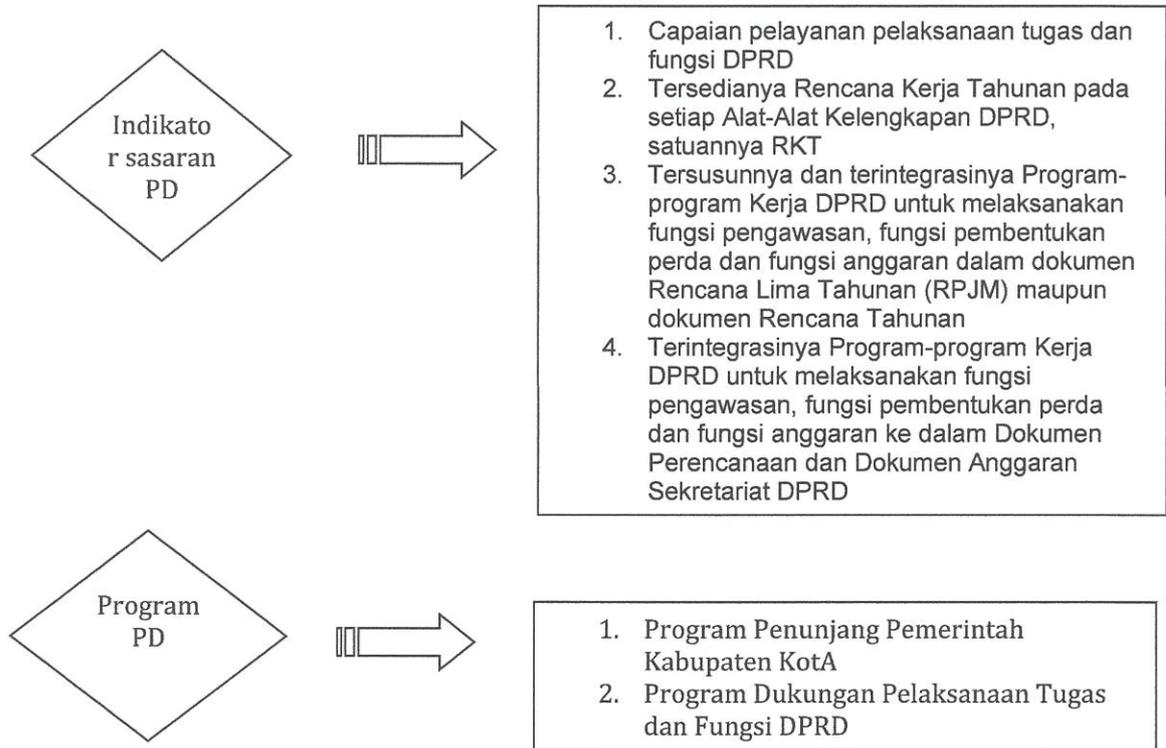
1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 2

Cascading Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai



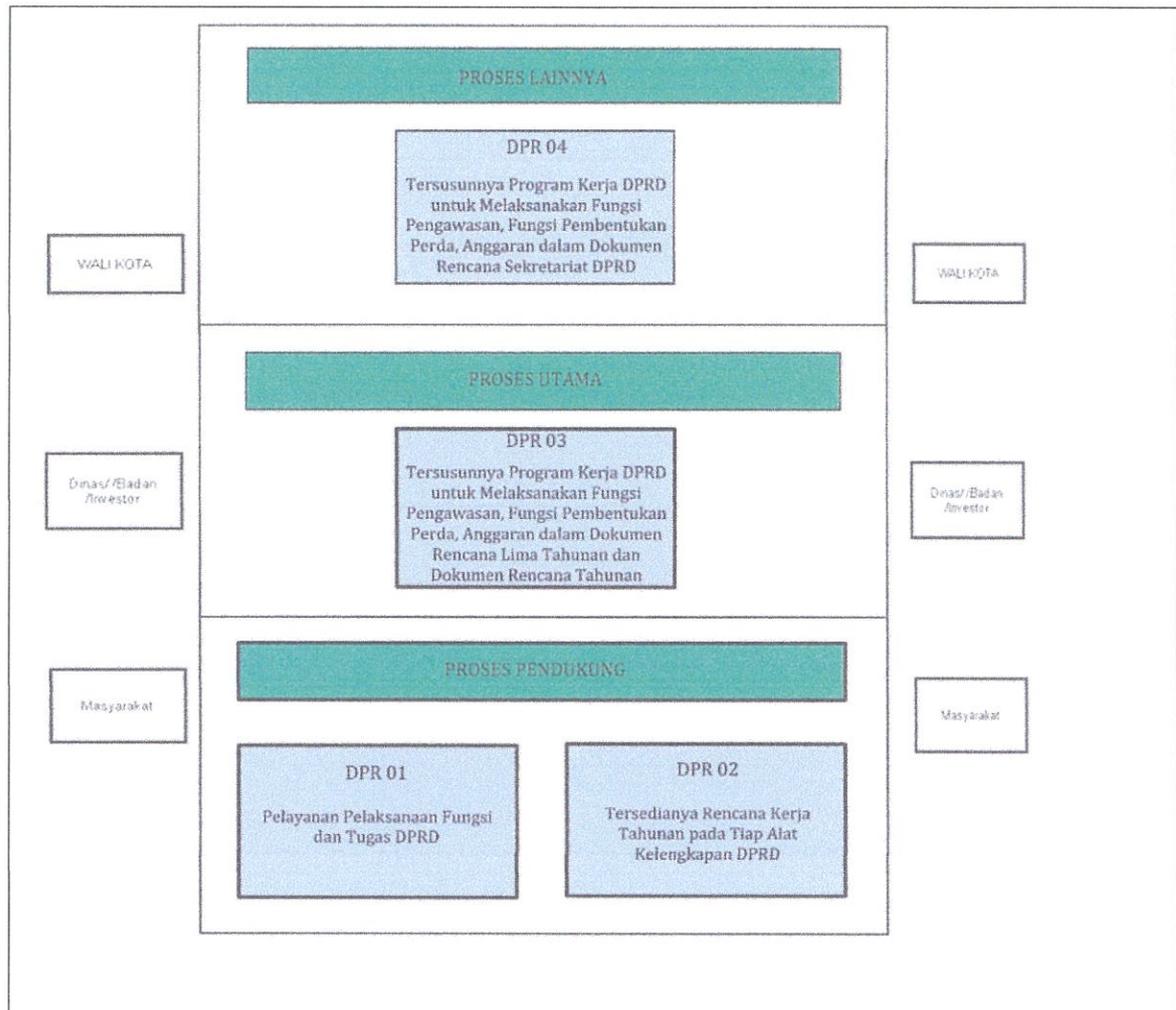


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 3

Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/LHE-SAKIP/26/INSP Tanggal 24 Oktober 2022 Hal Penyampaian LHE Implementasi SAKIP Tahun 2022, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 7

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Tidak Mempublikasikan dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Dumai	Mempublikasikan dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Dumai
2.	Tidak Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja	Agar Setiap Pegawai Merumuskan dan Menetapkan Perencanaan Kinerja
3.	Laporan Kinerja tidak mengifokan Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional	Agar Dokumen Laporan Kinerja mengifokan Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan tidak Menggunakan Teknologi Informasi	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan Menggunakan Teknologi Informasi

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 8

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Melakukan publikasi dokumen perencanaan sekretariat DPRD pada media channel publikasi yang dimiliki sekretariat DPRD	Tahun 2023
2.	Menetapkan perencanaan kinerja dengan menetapkan perjanjian kinerja tiap sdm dimulai dari sekretaris DPRD hingga Staff	Tahun 2023
3.	Melengkapi realisasi perbandingan kinerja organisasi terhadap kinerja tingkat nasional	Tahun 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

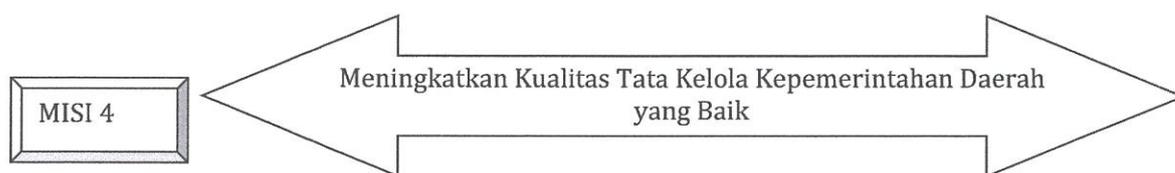
Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 4



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada
				Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada
				Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 10

**Strategi dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Dumai Tahun 2023**

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1 Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1. Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT
		3. Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan
		4. Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .	95 %
		2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada
		3	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada
		4	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi	Ada

		pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	
--	--	---	--

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 54.094.973.578,- (Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) Program Kerja antara lain :

Tabel 13

Program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 44.553.362.535	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 9.541.611.043	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 54.094.973.578	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 14

Program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 46.916.494.813	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 13.648.478.765	Dana Transfer Umum – Dana Bagi hasil
J U M L A H		Rp. 60.564.973.578	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 15

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 16

Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen

kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menetapkan satu Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan empat Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel.....dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 17

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	100 %	95 %	95 %	100%	Sangat Berhasil
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Sangat Berhasil
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Sangat Berhasil

		melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan						
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	100%	Ada	Ada	100%	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95 % realisasi sebesar 95% , tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95 % atau tercapai sebesar 100% %, maka capaian tahun 2023 tetap sebesar 100 %
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD ;

2. Indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah ada realisasi sebesar 100 % , tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yakni tersedianya alat-alat kelengkapan DPRD yang Satuanya RKT adalah Ada atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 tetap.
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT. sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Terjalannya hubungan yang harmonis serta komunikasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Indikator tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana

tahunan

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Ada realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95% atau tercapai sebesar 100%%, maka capaian tahun 2023 tetap.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan. sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan adalah sebagai berikut:
 - Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- Tindak lanjut Capaian Indikator tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan adalah sebagai berikut:
 - Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

4. Indikator tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan

- a. **Capaian kinerja** untuk Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah Ada realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95% atau tercapai sebesar 100%%, maka capaian tahun 2023 tetap.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian** Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD adalah sebagai berikut:
 - Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas kedewanan.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD adalah sebagai berikut:

- meningkatkan komunikasi dan konsultasi kepada DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dalam penyusunan Program DPRD terhadap Dokumenn Perencanaan Sekretariat DPRD

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 18

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	95%	95 %	95 %	100%	100%
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat empat Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target pada tahun 2022 adalah 95% berasal dari perhitungan tingkat capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Pada tahun 2022 dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan pencapaian Realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 95% dengan capaian kinerja 100%
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap 95% dan realisasinya adalah 100% dengan tercapainya capaian kinerja berupa pelayanan tugas dan fungsi DPRD.
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD dengan target yaitu adanya rencana kerja tahunan alat-alat kelengkapan DPRD, adapun capaian pada tahun 2022 yaitu 100%.
- b. pada tahun 2022 dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan pencapaian kinerja untuk indicator tersedianya rencana kerja alat-alat kelengkapan DPRD tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c. pada tahun 2023 target kinerja tetap yakni adanya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD dengan tingkat capaian 100%, sehingga dapat disimpulkan dengan kategori sangat berhasil.
- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima

Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan, pada tahun 2022, pencapaian pada indikator kinerja utama ini yakni 100% hal ini didapat dari adanya susunan dan intergarasi program program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan.

- b. pada tahun 2022 dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan secretariat DPRD dapat mencapai realisasi kinerja yang telah ditetapkan.
 - c. pada tahun 2023 target kinerja ada, sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan pencapaian kinerja pada tahun 2023 untuk indicator kinerja utama yang ketiga yakni ada, dengan capaian realisasi kinerja 100%.
- 4a. Indikator Kinerja Yang ke empat adalah Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, pada tahun 2022 pada indicator kinerja utama yang keempat yakni 100% hal ini didapat dari adanya integrasi program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
- b. pada tahun 2022 dukungan anggaran yang cukup dan memadai menjadikan secretariat DPRD dapat mencapai realisasi kinerja yang telah ditetapkan.
 - c. pada tahun 2023 target kinerja yaitu ada, sama dengan tahun sebelumnya, selanjutnya untuk pencapaian kinerja tahun 2023 untuk indicator kinerja utama yang ke empat ini yakni ada, dengan capaian kinerja 100%.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 19

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	95%	Signifikan
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada	Signifikan
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	Signifikan
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan	Ada	Ada	Signifikan

		Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD			
--	--	---	--	--	--

Upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada secretariat DPRD dengan cara peningkatan kompetensi SDM melalui pelaksanaan pendidikan pelatihan maupun bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi ;
 - Meningkatkan kinerja tiap individu SDM secretariat DPRD Kota Dumai sehingga dengan tercapainya kinerja individu nantinya akan meningkatkan capaian kinerja organisasi secara signifikan ;
2. Capaian Indikator Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD satuan RKT sebagai berikut :
 - Meningkatkan koordinasi kepada pimpinan dan angora DPRD dalam rangka penyusunan rencana kerja setiap alat kelengkapan DPRD;
 - Melakukan penyusunan lebih awal sebelum memasuki tahun berjalan, sehingga nantinya rumusan rencana kerja dapat disusun lebih awal ;
3. Capaian Indikator Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan sebagai berikut :
 - Melakukan penyusunan program kerja DPRD tiga bulan

sebelum memasuki tahun anggaran. ;

- Lebih meningkatkan koordinasi kepada pimpinan dan anggota DPRD melalui forum diskusi dan rapat internal ;
4. Capaian Indikator Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD sebagai berikut :
- Meningkatkan koordinasi kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sekretariat DPRD.
 - Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD berdasarkan rencana kerja tahunan DPRD baik tahunan maupun lima tahunan ;

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table 20 berikut :

Tabel 20

Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tersedia nya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	95% Ada		Isi dengan Ada/ Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas

		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada		
		Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada		

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar sebesar Rp 60.574.973.578 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah .) bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 58.696.373.428 (Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.878.600.150 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 53.779.927.308,26- (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Puluh Enam Sen Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 52.085.909.088,26 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan

Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Delapan Dua Puluh Enam Sen.) dan Belanja Modal terealisasi Rp 1.694.018.220,- . (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah .)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 21

Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.916.494.813	40.598.427.813	86,53%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	13.648.478.765	13.189.499.495	96,85%	

Total anggaran belanja adalah Rp 60.564.973.578,- dengan realisasi Rp 53.779.927.308,26,-.atau dengan capaian sebesar 88,80% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 11,2% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Tingkat Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
2. Adanya Silpa Penganggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 22

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
Sasaran : Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada	100%			

	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	100%			
	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	100%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	40.598.427.813	86,53%	86,53%
Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	13.189.499.495	96,85%	96,85%

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama* Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama* Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. *yaitu* tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (

100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori ***EFISIEN***

BAB IV

PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 15 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI


HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197106051999031013

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI
TAHUN 2021 - 2026**

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"
Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				95%	95%	95%	95%	100%	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				95%	95%	95%	95%	100%	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd			

											Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
											Terusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
											Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HADIYONO, S.Hut, M.Si**
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama,



HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada

1 Sasaran 1

Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi

Program Dukungan

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 9.541.611.043

JUMLAH Rp. 9.541.611.043



Dumai, Januari 2023



HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **HADIYONO, S.Hut, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023


Pihak Kedua,
H. PAISAL, SKM, MARS


Pihak Pertama,
HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada

Sasaran 1 :	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Program Dukungan		
		1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	13,648,478,765
		Jumlah	Rp.	13,648,478,765

Dumai, September 2023

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS


HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2023	Target Tahunan
				2023
(1)	(2)			(5)
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada

Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD



HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999081013

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022
EVALUASI RKPD TAHUN 2023
TRIWULAN IV
KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Hambatan/Kendala	Tidak Lajut				
					I		II		III		IV			12					13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	17										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.916.494.813	6.686.840.215	9.806.711.234	6.230.152.275	15.601.152.384	40.598.427.813	86,53%	40.598.427.813											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		127.099.300	-	14.040.000	14.905.000	96.580.800	125.525.800	98,76%	125.525.800											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3 Dokumen)	3 Dokumen	9.498.000	1	1	4.500.000	1	4.998.000	3	9.498.000	100,00%	100,00%	3,00	9.498.000						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2 Dokumen)	2 Dokumen	9.884.000		1	4.500.000	1	5.320.000	2	9.820.000	100,00%	99,35%		9.820.000						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (2 Dokumen)	2 Dokumen	7.364.000				1		1	7.364.000	100,00%	100,00%		7.364.000						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (2 Dokumen)	2 Dokumen	24.982.400			1.680.000	1	5.385.000	1	17.372.400	100,00%	97,82%	2,00	24.437.400						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2 Dokumen)	2 Dokumen	24.982.400	1				1	24.340.900	2	24.340.900	100,00%	97,43%		24.340.900					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 Laporan)	4 Laporan	24.679.000					4	24.466.000	4	24.466.000	100,00%	99,14%	4,00	24.466.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	1 Laporan	25.709.500			3.360.000		4.200.000	1	18.039.500	1	25.599.500	100,00%	99,57%	1,00	25.599.500				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.413.242.204	937.833.066	1.686.469.809	765.949.857	1.769.303.972	5.159.556.704	95,31%	5.159.556.704											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (45 Orang/bulan)	45 Orang/bulan	5.362.571.204	937.833.066	1.686.469.809	765.949.857	45	1.718.777.972	45	5.109.030.704	100,00%	95,27%	45,00	5.109.030.704						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)	2 Laporan	25.366.800			1		1	25.316.800	2	25.316.800	100,00%	99,80%	2,00	25.316.800					
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 Dokumen)	1 Dokumen	25.304.200				1	25.209.200	1	25.209.200	100,00%	99,62%	1,00	25.209.200						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		38.880.000	-	5.315.000	4.175.000	28.933.000	38.423.000	98,82%	38.423.000											

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	17								
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen)	1 Dokumen	24.000.000			1	23.943.000	1	23.943.000	100,00%	99,76%	1,00	23.943.000					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	2 Laporan	14.880.000		5.315.000	1	4.175.000	1	4.990.000	100,00%	97,31%	2,00	14.480.000					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			275.000.000		100.000.000				39.000.000		139.000.000		50,55%		139.000.000			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (86 Orang)	86 orang	275.000.000	25	100.000.000			5	39.000.000	30	139.000.000	34,88%	50,55%	30,00	139.000.000	dalam proses pelaksanaan kegiatan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.103.394.390		1.326.454.610		2.405.003.141		1.580.705.080		4.532.696.047		9,805.289.436		97,84%		9.885.289.436	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (12 Paket)	12 Paket	225.000.000		6	30.895.846		6	159.975.124	12	190.870.970	100,00%	84,83%	12,00	190.870.970			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (12 Paket)	12 Paket	219.000.000		6	9.458.310	1	108.745.738	5	97.326.110	12	215.530.158	100,00%	98,42%	12,00	215.530.158		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (12 Paket)	12 Paket	200.000.000		6	35.945.586	1	32.322.007	5	113.435.194	12	181.702.787	100,00%	90,85%	12,00	181.702.787	kegiatan ada yang sudah dibayarkan tapi belum di spj pertanggungjawaban oleh bendahara	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayar kan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (12 Paket)	12 Paket	215.701.000		6	47.709.798	1	32.399.297	5	116.620.483	12	196.729.578	100,00%	91,20%	12,00	196.729.578	kegiatan ada yang sudah dibayarkan tapi belum di spj pertanggungjawaban oleh bendahara	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayar kan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (12 Paket)	12 Paket	241.400.000					12	208.517.643	12	208.517.643	100,00%	86,38%	12,00	208.517.643	kegiatan ada yang sudah dibayarkan tapi belum di spj pertanggungjawaban oleh bendahara	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayar kan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (1 Dokumen)	1 Dokumen	96.480.000		960.000	10.572.000		6.668.000	1	22.052.000	1	40.252.000	100,00%	41,72%	1,00	40.252.000		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (1 Dokumen)	1 Dokumen	35.000.000						1	32.439.750	1	32.439.750	100,00%	92,69%	2,00	32.439.750		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (1 Laporan)	1 Laporan	250.000.000			75.037.427		18.454.125	1	105.027.951	1	198.519.503	100,00%	79,41%	1,00	198.519.503		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 Laporan)	1 Laporan	8.620.813.390		1.325.494.610	2.195.384.174		1.390.115.921	1	3.709.732.342	1	8.620.727.047	100,00%	100,00%	1,00	8.620.727.047		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.049.358.000			8	234.227.000	7	40.470.000	29	1.638.385.360		1.913.082.360		93,35%		1.913.082.360	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Unit)	1 Unit	125.208.000			1	125.160.000				1	125.160.000	100,00%	99,96%		125.160.000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2 Unit)	2 Unit	40.000.000						1	39.307.000	1	39.307.000	50,00%	98,27%		39.307.000		

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut	
					I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (15 Unit)	15 Unit	200.000.000					15	161.427.200		161.427.200	0,00%	80,71%		161.427.200				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (25 Unit)	25 Unit	1.000.000.000		6	73.926.000	7	40.470.000	12	834.267.000	25	948.663.000	100,00%	94,87%	25,00	948.663.000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1 unit)	1 Unit	175.000.000		1	26.400.000				146.039.910	1	172.439.910	100,00%	98,54%	1,00	172.439.910			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1 unit)	1 Unit	509.150.000			8.741.000			1	457.344.250	1	466.085.250	100,00%	91,54%	1,00	466.085.250			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.466.448.520		363.549.227	500.029.516		367.339.247		1.014.416.135		2.304.224.125	93,42%		2.304.224.125				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1 Laporan)	1 Laporan	22.927.120					1	20.000.000	1	20.000.000	100,00%	87,23%	1,00	20.000.000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1 Laporan)	1 Laporan	400.900.000		92.649.227	57.079.516		57.739.247	1	153.118.675	1	360.586.665	100,00%	89,94%	1,00	360.586.665			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (3 Laporan)	3 Laporan	60.000.000					1	58.890.000	1	58.890.000	33,33%	98,15%	1,00	58.890.000				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (5 Laporan)	5 Laporan	1.982.621.400	1	270.900.000	1	442.950.000	1	309.600.000	2	841.297.460	5	1.864.747.460	100,00%	94,05%	5,00	1.864.747.460		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.864.769.900		112.820.485	54.817.005		92.469.998		503.618.196		2.673.507.639,26	93,32%		2.673.507.639				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (10 Unit)	10 Unit	275.000.000	3	84.220.485	1	22.529.069	2	61.338.090	2	104.734.630	8	272.822.274	80,00%	99,21%	8,00	272.822.274	dalam proses pelaksanaan dan menunggu selesai sehingga belum di SPJ pertanggungjawaban dan belum dibayar	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayarkan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (10 unit)	10 Unit	275.000.000	3	84.220.485	1	22.529.069	2	61.338.090	2	104.734.630	8	272.822.274	80,00%	99,21%	8,00	272.822.274	dalam proses pelaksanaan dan menunggu selesai sehingga belum di SPJ pertanggungjawaban dan belum dibayar	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayarkan
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (10 Unit)	10 Unit	25.000.000										0,00%	0,00%	0,00		dalam proses pelaksanaan dan menunggu selesai sehingga belum di SPJ pertanggungjawaban dan belum dibayar	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayarkan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (115 Unit)	115 Unit	200.000.000	17	22.600.000	33	32.287.936		21.091.958	10	58.975.566	60	134.955.460	52,17%	67,48%	60,00	134.955.460	dalam proses pelaksanaan dan menunggu selesai sehingga belum di SPJ pertanggungjawaban dan belum dibayar	menunggu proses pelaksanaan kegiatan untuk bisa di SPJ kan dan di bayarkan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)	1 Unit	1.233.785.552						1	1.202.744.955	1	1.202.744.955,26	100,00%	97,48%	1,00	1.202.744.955			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit)	1 Unit	350.000.000						10.039.950	1	339.908.000	1	349.947.950	100,00%	99,99%	1,00	349.947.950		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut						
						I		II		III		IV										12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
1																											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (10 Unit)	10 Unit	742.454.348							4	683.093.000	4	683.093.000	40,00%	92,00%	4,00	683.093.000								
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			23.083.344.055	3.742.445.677	4.750.415.263	3.340.638.085	5.779.036.374	17.884.995.399	77,48%	17.884.995.399															
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (30 Orang/bulan)	30 Orang/bulan	22.159.800.855	3.742.445.677	4.695.803.263	2.976.502.585	30	5.625.286.374	30	17.040.037.899	100,00%	76,90%	30,00	17.040.037.899											
		Penyediaan Pakaihan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaihan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (6 Paket)	6 Paket	573.543.200		1	54.612.000	3	364.135.500	2	153.750.000	6	572.497.500	100,00%	99,82%	6,00	572.497.500									
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (30 Orang)	30 Orang	350.000.000							23	272.460.000	23	272.460.000	76,67%	77,85%	23,00	272.460.000								
		Layanan Administrasi DPRD			494.958.444	103.737.150	156.394.500	15.500.000	199.191.700	474.823.350	95,93%	474.823.350															
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (5 Dokumen)	5 Dokumen	494.958.444	103.737.150	156.394.500	15.500.000	2	199.191.700	5	474.823.350	100,00%	95,93%	5,00	474.823.350											
		SEKRETARIAT DPRD																									
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			13.648.478.765	2.142.077.700	1.780.596.015	2.147.156.266	7.111.669.514	13.181.499.495	96,58%	13.181.499.495															
		Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.612.550.984	250.103.393	190.333.500	416.120.000	750.476.576	1.607.033.469	99,66%	1.607.033.469															
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (5 Dokumen)	5 Dokumen	715.793.400	167.286.514	43.500.000	1	25.090.000	1	478.253.776	4	714.130.290	80,00%	99,77%	4,00	714.130.290										
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (6 Dokumen)	6 Dokumen	389.071.000		1	25.920.000	1	93.080.000	1	267.502.800	3	386.502.800	50,00%	99,34%	3,00	386.502.800									
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (5 Dokumen)	5 Dokumen	134.511.104	82.816.879	48.229.500		1	2.330.000	5	133.376.379	100,00%	99,16%	5,00	133.376.379											
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (4 Dokumen)	4 Dokumen	373.175.400		1	72.684.000	2	297.950.000	1	2.390.000	4	373.024.000	100,00%	99,96%	4,00	373.024.000									
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.449.540.000	118.332.196	56.685.960	153.734.877	1.078.683.477	1.407.436.510	97,10%	1.407.436.510															
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1 Dokumen)	1 Dokumen	100.000.000				1	83.922.302	1	83.922.302	100,00%	83,92%	1,00	83.922.302											
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Dokumen)	1 Dokumen	180.000.000	35.479.260	10.417.400	11.655.200	1	119.587.500	1	177.139.360	100,00%	98,41%	1,00	177.139.360											
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dokumen)	1 Dokumen	304.000.000				1	296.500.748	1	296.500.748	100,00%	97,53%	1,00	296.500.748											
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dokumen)	1 Dokumen	240.540.000	22.501.740			1	211.134.657	1	233.636.397	100,00%	97,13%	1,00	233.636.397											
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (2 Dokumen)	2 Dokumen	160.000.000	29.669.930	36.980.040	1	35.449.170	1	55.239.600	2	157.338.740	100,00%	98,34%	2,00	157.338.740										
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dokumen)	1 Dokumen	465.000.000	30.681.266	9.288.520	106.630.507	1	312.298.670	1	458.898.963	100,00%	98,69%	1,00	458.898.963											

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut			
					I		II		III		IV							12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	17								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			614.866.800	59.054.200	112.416.500	20.825.800	266.258.077	458.554.577	74,58%	458.554.577								
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (1 Laporan)	1 Laporan	44.150.000	5.866.000		1.920.000	1	34.604.700	1	42.390.700	100,00%	96,02%	1,00	42.390.700				
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (1 Laporan)	1 Laporan	45.344.000		6.325.000		1	7.397.000	1	13.722.000	100,00%	30,26%	1,00	13.722.000	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan	menunggu penyelesaian kegiatan untuk bisa di SPJ pertanggungjawabkan		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (1 Laporan)	1 Laporan	43.878.000	4.240.000	1.200.000	4.030.300	1	7.722.500	1	17.192.800	100,00%	39,18%	1,00	17.192.800	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan	menunggu penyelesaian kegiatan untuk bisa di SPJ pertanggungjawabkan		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (1 Laporan)	1 Laporan	47.676.000	6.826.400			1	9.266.400	1	16.092.800	100,00%	33,75%	1,00	16.092.800	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan	menunggu penyelesaian kegiatan untuk bisa di SPJ pertanggungjawabkan		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (1 Laporan)	1 Laporan	43.234.480	17.415.000		4.480.000	1	9.132.100	1	31.027.100	100,00%	71,76%	1,00	31.027.100	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan	menunggu penyelesaian kegiatan untuk bisa di SPJ pertanggungjawabkan		
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (1 Dokumen)	1 Dokumen	78.380.000	7.229.500		10.395.500	1	53.848.500	1	71.473.500	100,00%	91,19%	1,00	71.473.500				
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 Dokumen)	1 Dokumen	58.848.000	17.477.300	7.518.500		1	18.414.800	1	43.410.680	100,00%	73,77%	1,00	43.410.680	masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan	menunggu penyelesaian kegiatan untuk bisa di SPJ pertanggungjawabkan		
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (1 Dokumen)	1 Dokumen	253.356.320		97.373.000		1	125.871.997	1	223.244.997	100,00%	88,12%	1,00	223.244.997				
		Peningkatan Kapasitas DPRD			1.321.630.000	368.782.400	194.515.252	223.319.621	461.212.060	1.247.829.333	94,42%	1.247.829.333								
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (4 Dokumen)	4 Dokumen	868.430.000	306.382.400	91.915.252	157.319.621	1	260.351.140	4	815.968.413	100,00%	93,96%	4,00	815.968.413	Pelaksanaan sesuai dengan agenda bimtek partai dari Anggota Dewan	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan agenda Bimtek Partai		
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (16 orang)	16 orang	50.000.000				16	30.012.420	16	30.012.420	100,00%	60,02%	16,00	30.012.420				
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (14 orang)	14 orang	403.200.000	62.400.000	102.600.000	66.000.000	14	170.848.500	14	401.848.500	100,00%	99,66%	14,00	401.848.500				
		Penyerapan dan Penghimpunan Asuransi Masyarakat			3.163.515.000	83.935.805	887.755.200	875.793.898	1.187.466.152	3.034.951.055	95,94%	3.034.951.055								
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 dokumen)	1 Dokumen	464.604.800	41.936.425	37.620.000	47.380.700	1	222.298.753	1	349.235.878	100,00%	75,17%	1,00	349.235.878				
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (3 dokumen)	3 Dokumen	2.698.910.200	41.999.380	850.135.200	828.413.198	1	965.167.399	3	2.685.715.177	100,00%	99,51%	3,00	2.685.715.177				
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			139.042.000	-	27.888.900	31.655.200	75.433.691	134.977.791	97,08%	134.977.791								
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (1 Laporan)	1 Laporan	139.042.000		27.888.900	31.655.200	1	75.433.691	1	134.977.791	100,00%	97,08%	1,00	134.977.791				
		Pembahasan Kerja Sama Daerah			754.671.075	40.405.357	177.291.000	44.722.800	458.297.811	720.716.968	95,50%	720.716.968								
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (1 Dokumen)	1 Dokumen	754.671.075	40.405.357	177.291.000	44.722.800	1	458.297.811	1	720.716.968	100,00%	95,50%	1,00	720.716.968				
		Fasilitasi Tugas DPRD			4.592.662.986	1.221.464.349	133.709.703	380.984.070	2.833.841.670	4.569.999.792	99,51%	4.569.999.792								

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPPMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Hambatan/Kendala	Tindak Lanjut			
					I		II		III		IV				12				13=12/7x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	1.128.643.502	1	356.754.973			1	270.165.890	1	496.953.881	3	1.123.874.744	100,00%	99,58%	3,00	1.123.874.744		
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	233.450.000			1.20.000		7.594.000	1	218.941.819	1	227.655.819	100,00%	97,52%	1,00	227.655.819			
		Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	906.389.500	1	339.038.397	132.589.703		7.984.000		415.538.162	1	895.150.262	100,00%	98,76%	1,00	895.150.262			
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	2.324.179.984	1	525.670.979			1	95.240.180	2	1.702.407.808	4	2.323.318.967	100,00%	99,96%	4,00	2.323.318.967		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0,94	88,80%								
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi								
					60.564.973.578	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								53.779.927.308,26	93,72%	88,80%					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Tinggi								

No.	INTERVAL NILAI REALISASI (%)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	Satuan Target dan Realisasi	CAPAIAN	Satuan Capaian	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Satuan Capaian	PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	I Belanja Operasi						Rp 58.686.373.428	Rp 52.085.909.088	88,75	%			
	II Belanja Modal						Rp 1.878.600.150	Rp 1.694.018.220	90,17	%			
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100	94,73	%	94,73	%	Rp 46.916.494.813	Rp 40.598.427.813	86,53	%	-	-	
	Indikator Program : Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	10	dokumen	33	%	Rp 127.099.300	Rp 125.525.800	98,76	%			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	dokumen	67	%	Rp 9.498.000	Rp 9.498.000	100,00	%			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	dokumen	100	%	Rp 9.884.000	Rp 9.820.000	99,35	%			
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	1	dokumen	50	%	Rp 7.364.000	Rp 7.364.000	100,00	%			
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	dokumen	100	%	Rp 24.982.400	Rp 24.437.400	97,82	%			
	5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1	dokumen	50	%	Rp 24.982.400	Rp 24.340.900	97,43	%			
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja	4	1	dokumen	25	%	Rp 24.679.000	Rp 24.466.000	99,14	%			
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	dokumen	100	%	Rp 25.709.500	Rp 25.599.500	99,57	%			
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	92,86	%	98	%	Rp 5.413.242.204	Rp 5.159.556.704	95,31	%			
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	13	bulan	93	%	Rp 5.362.571.204	Rp 5.109.030.704	95,27	%			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	1	Laporan	50	%	Rp 25.366.800	Rp 25.316.800	99,80	%			
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	dokumen	100	%	Rp 25.304.200	Rp 25.209.200	99,62	%			
	3 Administrasi Barang Milik Daerah	95	100,00	%	105	%	Rp 38.880.000	Rp 38.423.000	98,82	%			
	1 Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	dokumen	100	%	Rp 24.000.000	Rp 23.943.000	99,76	%			
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Laporan	100	%	Rp 14.880.000	Rp 14.480.000	97,31	%			
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	72,00	%	76	%	Rp 275.000.000	Rp 139.000.000	50,55	%	Tidak sesuai target kinerja yang ditetapkan pada saat perencanaan dikarenakan informasi yang kurang akurat	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya	
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	86	25	orang	29	%	Rp 275.000.000	Rp 139.000.000	50,55	%			
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	100,00	%	105	%	Rp 10.103.394.390	Rp 9.885.289.436	97,84	%			

		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12	12	bulan	100	%	Rp 225.000.000	Rp 190.870.970	84,83	%			
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	bulan	100	%	Rp 219.000.000	Rp 215.530.158	98,42	%			
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	bulan	100	%	Rp 200.000.000	Rp 181.702.787	90,85	%			
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	bulan	100	%	Rp 215.701.000	Rp 196.729.578	91,20	%			
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	bulan	100	%	Rp 241.400.000	Rp 208.517.643	86,38	%			
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	bulan	100	%	Rp 96.480.000	Rp 40.252.000	41,72	%	Tidak sesuai target kinerja yang ditetapkan pada saat perencanaan dikarenakan informasi yang kurang akurat	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya	
		7	Penyediaan Bahan/Material	12	12	bulan	100	%	Rp 35.000.000	Rp 32.439.750	92,69	%			
		8	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	bulan	100	%	Rp 250.000.000	Rp 198.519.503	79,41	%			
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	bulan	100	%	Rp 8.620.813.390	Rp 8.620.727.047	100,00	%			
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	95	100,00	%	105	%	Rp 2.049.358.000	Rp 1.913.082.360	93,35	%			
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	paket	100	%	Rp 125.208.000	Rp 125.160.000	99,96	%			
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	paket	100	%	Rp 40.000.000	Rp 39.307.000	98,27	%			
		3	Pengadaan Mebel	15	2	Unit	13	%	Rp 200.000.000	Rp 161.427.200	80,71	%			
		4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	13	unit	52	%	Rp 1.000.000.000	Rp 948.663.000	94,87	%			
		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	paket	100	%	Rp 175.000.000	Rp 172.439.910	98,54	%			
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	paket	100	%	Rp 509.150.000	Rp 466.085.250	91,54	%			
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	100,00	%	105	%	Rp 2.466.448.520	Rp 2.304.224.125	93,42	%			
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	bulan	100	%	Rp 22.927.120	Rp 20.000.000	87,23	%			
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	bulan	100	%	Rp 400.900.000	Rp 360.586.665	89,94	%			
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	bulan	100	%	Rp 60.000.000	Rp 58.890.000	98,15	%			
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan	100	%	Rp 1.982.621.400	Rp 1.864.747.460	94,05	%			
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	100,00	%	105	%	Rp 2.864.769.900	Rp 2.673.507.639	93,32	%			

			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	bulan	100	%	Rp 38.530.000	Rp 29.944.000	77,72	%		
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	bulan	100	%	Rp 275.000.000	Rp 272.822.274	99,21	%		
			3	Pemeliharaan Mebel	12		bulan	0	%	Rp 25.000.000	Rp -	-	%	Belum terealisasi di tahun 2023	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya
			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	bulan	100	%	Rp 200.000.000	Rp 134.955.460	67,48	%	Tidak sesuai target kinerja yang ditetapkan pada saat perencanaan dikarenakan informasi yang kurang akurat	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	paket	100	%	Rp 1.233.785.552	Rp 1.202.744.955	97,48	%		
			6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	paket	100	%	Rp 350.000.000	Rp 349.947.950	99,99	%		
			7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	paket	100	%	Rp 742.454.348	Rp 683.093.000	92,00	%		
			9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	95	96,74	%	101,83	%	Rp 23.083.344.055	Rp 17.884.995.399	77,48	%		
			1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	30	30	orang	100	%	Rp 22.159.800.855	Rp 17.040.037.899	76,90	%		
			2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6	6	Paket	100	%	Rp 573.543.200	Rp 572.497.500	99,82	%		
			3	Pelaksanaan Medical Cek Up	30	30	orang	100	%	Rp 350.000.000	Rp 272.460.000	77,85	%		
			10	Layanan Administrasi DPRD	95	100,00	%	105	%	Rp 494.958.444	Rp 474.823.350	95,93	%		
			1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5	3	dokumen	60	%	Rp 494.958.444	Rp 474.823.350	95,93	%		
			2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95	96,38	%	101	%	Rp 13.648.478.765	Rp 13.181.499.495	96,58	%		
				Indikator Program : Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD											
			1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	95	75	%	79	%	Rp 1.612.550.904	Rp 1.607.033.469	99,66	%		
			1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	4	pansus	100	%	Rp 715.793.400	Rp 714.130.290	99,77	%		
			2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11	2	ranperda	18	%	Rp 389.071.000	Rp 386.502.800	99,34	%		
			3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	4	4	kajian	100	%	Rp 134.511.104	Rp 133.376.379	99,16	%		

		4	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	5	5	kajian	100	%	Rp 373.175.400	Rp 373.024.000	99,96	%		
	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		95	100	%	105	%	Rp 1.449.540.000	Rp 1.407.436.510	97,10	%		
		1	Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	nota kesepakatan	100	%	Rp 100.000.000	Rp 83.922.302	83,92	%		
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	nota kesepakatan	100	%	Rp 180.000.000	Rp 177.139.360	98,41	%		
		3	Pembahasan APBD	1	1	perda	100	%	Rp 304.000.000	Rp 296.500.748	97,53	%		
		4	Pembahasan APBD Perubahan	1	1	perda	100	%	Rp 240.540.000	Rp 233.636.397	97,13	%		
		5	Pembahasan Laporan Semester	2	2	laporan	100	%	Rp 160.000.000	Rp 157.338.740	98,34	%		
		6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	perda	100	%	Rp 465.000.000	Rp 458.898.963	98,69	%		
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		95	100	%	105	%	Rp 614.866.800	Rp 458.554.577	74,58	%		
		1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12	bulan	100	%	Rp 44.150.000	Rp 42.390.700	96,02	%		
		2	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	12	12	bulan	100	%	Rp 45.344.000	Rp 13.722.000	30,26	%	Adanya perubahan peraturan dari Instansi Pusat dalam perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat beberapa sub kegiatan belum jelas target kerjanya.	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya
		3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	12	bulan	100	%	Rp 43.878.000	Rp 17.192.800	39,18	%		
		4	Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	12	12	bulan	100	%	Rp 47.676.000	Rp 16.092.800	33,75	%		
		5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	12	bulan	100	%	Rp 43.234.480	Rp 31.027.100	71,76	%		
		6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12	12	bulan	100	%	Rp 78.380.000	Rp 71.473.500	91,19	%		
		7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	12	bulan	100	%	Rp 58.848.000	Rp 43.410.680	73,77	%	Adanya perubahan peraturan dari Instansi Pusat dalam perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat beberapa sub kegiatan belum jelas target kerjanya.	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya
		8	Pembahasan Laporan Keterangan	1	1	rekomendasi	100	%	Rp 253.356.320	Rp 223.244.997	88,12	%		
	4	Peningkatan Kapasitas DPRD		95	100	%	105	%	Rp 1.321.630.000	Rp 1.247.829.333	94,42	%		
		1	Pendalaman Tugas DPRD	4	4	dokumen	100	%	Rp 868.430.000	Rp 815.968.413	93,96	%		
		2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	12	orang	100	%	Rp 50.000.000	Rp 30.012.420	60,02	%	Adanya perubahan peraturan dari Instansi Pusat dalam perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat beberapa sub kegiatan belum jelas target kerjanya.	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun anggaran berikutnya

		3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8	8	orang	100	%	Rp 403.200.000	Rp 401.848.500	99,66	%			
		5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	95	100	%	105	%	Rp 3.163.515.000	Rp 3.034.951.055	95,94	%			
		1	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	5	5	kegiatan	100	%	Rp 464.604.800	Rp 349.235.878	75,17	%			
		2	Pelaksanaan Reses	3	3	kegiatan	100	%	Rp 2.698.910.200	Rp 2.685.715.177	99,51	%			
		6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	95	100	%	105	%	Rp 139.042.000	Rp 134.977.791	97,08	%			
		1	Pegawasan Kode Etik DPRD	1	1	AKD	100	%	Rp 139.042.000	Rp 134.977.791	97,08	%			
		7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	95	100	%	105	%	Rp 754.671.075	Rp 720.716.968	95,50	%			
		1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	12	12	bulan	100	%	Rp 754.671.075	Rp 720.716.968	95,50	%			
		8	Fasillitas Tugas DPRD	95	100	%	105	%	Rp 4.592.662.986	Rp 4.569.999.792	99,51	%			
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	12	bulan	100	%	Rp 1.128.643.502	Rp 1.123.874.744	99,58	%			
		2	Fasillitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	bulan	100	%	Rp 233.450.000	Rp 227.655.819	97,52	%			
		3	Fasillitas Tugas Pimpinan DPRD	12	12	bulan	100	%	Rp 906.389.500	Rp 895.150.262	98,76	%			
		4	Fasillitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	12	12	bulan	100	%	Rp 2.324.179.984	Rp 2.323.318.967	99,96	%			